

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
INFORMASI BERKALA
INSTANSI/SKPD: BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DIY
TAHUN 2018

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA									
NO.	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI	UNIT KERJA YANG Menguasai	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	KODE KLASIFIKASI	RETENSI ARSIP	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA		
							CETAK	REKAM	ONLINE
1.	Profil BPPM DIY : a. Visi dan Misi Gubernur b. Alamat BPPM DIY c. Tugas dan wewenang BPPM DIY d. Struktur organisasi	Sekretaris	Sub bagian Program, Data, dan TI	Setiap ada perubahan	Berkala	Selama Berlaku	√	√	√
2.	Rencana Strategis : a. Renstra 2012 – 2017 b. Perubahan 2012 – 2017	Sekretaris	Sub bagian Program, Data, dan TI	Setiap awal tahun anggaran	Berkala	Selama Berlaku	√	√	√
3.	Rencana program/kegiatan 2018 : a. Program/kegiatan Renja 2018 b. Target tahun 2018 c. Realisasi tahun 2017	Sekretaris	Sub bagian Program, Data, dan TI	Setiap awal tahun anggaran	Berkala	Selama Berlaku	√	√	√

	Laporan realisasi program/ kegiatan APBD 2017 : a. Pembinaan Pengarusutamaan Gender b. Pemberdayaan Peranan Perempuan di Bidang Ekonomi c. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan dan Anak	Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan	Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan	2017	Berkala	1 Tahun	√	√	
	d. Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja e. Pembinaan KB dan Pelayanan KB f. Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Keberdayaan Keluarga	Bidang Keluarga Berencana	Bidang Keluarga Berencana	2017	Berkala	1 Tahun	√	√	
	g. Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Pedesaan h. Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2017	Berkala	1 Tahun	√	√	

4.	i. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa j. Peningkatan Kapasitas Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2017	Berkala	1 Tahun	√	√	
5.	Laporan hasil pengukuran kinerja BPPM 2017 a. Laporan kinerja instansi b. pemerintah tahun 2017	Sekretaris	Sub bagian Program, Data, dan TI	2017	Berkala	1 Tahun	√	√	
6.	Dokumen / Buku hasil kegiatan 2016-2017 :								
	a. Buku Saku Ketahanan Keluarga	Bidang Keluarga Berencana	Bidang Keluarga Berencana	2018	1 Tahun	Berkala	√	√	
	b. Buku Saku Kesehatan Reproduksi Remaja c. Grand Desain Ketahanan Keluarga	Bidang Keluarga Berencana	Bidang Keluarga Berencana	2017	1 Tahun	Berkala	√	√	
	d. Buku Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja	Bidang Keluarga Berencana	Bidang Keluarga Berencana	2016	1 Tahun	Berkala	√	√	
	e. Buku ketahanan Keluarga menjadi Orang tua Hebat	Bidang Keluarga Berencana	Bidang Keluarga Berencana	2016	1 Tahun	Berkala	√	√	
	f. Buku Data Gender dan Anak	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan	2017	1 Tahun	Berkala	√	√	√

	g. Profil Pemenuhan Hak Anak	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan	2017			√	√	√
	h. Survey Prevalensi Kekerasan dalam Rumah Tangga	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan	2017	1 Tahun	Berkala	√	√	√
	i. Profil Perempuan Potensial	Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan	Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan	2017	1 Tahun	Berkala	√	√	
7.	Rencana program/kegiatan APBD : a. Program/ kegiatan Renja januari s/d april 2017 b. Target januari s/d april 2017 c. Realisasi januari s/d april 2017 d. Laporan prognosis s/d juni 2017	Sub bagian Program, Data, dan TI	Sub bagian Program, Data, dan TI	2017	Berkala	3 Bulan	√		
8.	Laporan LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur			2017	Berkala		√	√	
9.	Peraturan yang mengikat : a. UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan	2004	Berkala	Selama belum ada perubahan peraturan/	√	√	√

	b. UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan	2008	Berkala	keputusan/ kebijakan	√	√	√
	c. UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan	2008	Berkala	Selama belum ada perubahan peraturan/ keputusan/ kebijakan	√	√	√
	d. Permen PP dan PA no. 01 tahun 2010 tentang SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan	2010	Berkala	Selama belum ada perubahan peraturan/ keputusan/ kebijakan	√	√	√
	e. Peraturan Menteri PP dan PA No.7 Th. 2011 ttg Kebijakan Peningkatan Keluarga anak yang membutuhkan perlindungan khusus	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan	2011	Berkala		√	√	√
	f. Permen PP dan PA No.5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem gender dan anak	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan	2014	Berkala		√	√	√
	g. Permen PP dan PA No.15 Tahun 2010 ttg Pedoman Umum Penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan	2010	Berkala		√	√	√

	h. Permen Negara PP dan PA Nomor 3 Tahun 2011 ttg Kebijakan Partisipasi anak dalam Pembangunan	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan		2011			√	√	√
	i. Permen Negara PP dan PA Nomor 4 Tahun 2011 ttg Petunjuk Pelaksanaan Partisipasi anak dalam Pembangunan	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan	2011	Berkala	Selama belum ada perubahan peraturan/ keputusan/ kebijakan	√	√	√
	j. Permen PP dan PA No. 13 Tahun 2010 ttg Pedoman Pengembangan Kab/Kota layak anak Tingkat propinsi	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan	2010	Berkala		√	√	√
	k. Permen PP dan PA No.14 Tahun 2010 ttg Petunjuk teknis Kabupaten/Kota layak anak di Desa/Kelurahan	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan	2010	Berkala		√	√	√
	l. Permen PP dan PA Nomor 12 Tahun 2011 ttg indikator kabupaten/kota layak anak	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan	2011	Berkala		√	√	√
	m. Permen Pp dan PA Nomor 14 Tahun 2011 ttg Panduan evaluasi kabupaten / kota layak anak	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan	2011	Berkala		√	√	√

	n. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 ttg Pengarusutamaan Gender Dalam pembangunan Nasional	Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan	Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan	2000	Berkala	Selama belum ada perubahan peraturan/ keputusan/ kebijakan	√	√	√
	o. Permen Dalam Negeri nomor 15 Tahun 2008 ttg Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender	Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan	Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan	2008			√	√	√
	p. UU RI No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga	Bidang Keluarga Berencana	Bidang Keluarga Berencana	2009			√	√	√
	q. UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	Bidang Keluarga Berencana		2013			√	√	√
	r. Permen Dalam Negeri No.54 Tahun 2007 ttg Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2007			√	√	√
	s. Permen Dalam Negeri No.1 Tahun 2013 ttg Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		2013			√	√	√
	t. Permen Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 ttg Pedoman Pembangunan desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2014			Berkala		√

	u. Permen Dalam Negeri No.42 Tahun 2005 ttg Pedoman Penyelenggaraan BBGRM	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		2005		Selama belum ada perubahan peraturan/ keputusan/ kebijakan	√	√	√
	v. Permen Dalam Negeri No.12 Tahun 2007 ttg Pedoman Pendayaan Data Profil Desa dan kelurahan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2007	Berkala		√	√	√
	w. Permen Dalam Negeri No.42 Tahun 2007 ttg Pedoman Pengelolaan Pasar Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		2007			√	√	√
	x. Permen Dalam Negeri No.20 Tahun 2010 ttg Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan TTG	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2010		Selama belum ada perubahan peraturan/ keputusan/ kebijakan	√	√	√
	y. Permen Desa , Pembangunan Desa Tertinggal dan Trans RI No.4 Tahun 2015 ttg Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran BUMDESAPengelolaan dan Pembubaran BUMDESA	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2015	Berkala		√	√	√
	z. Permen Dalam Negeri No.81 Tahun 2015 ttg evaluasi Perkembangan desa dan kelurahan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2015			√	√	√

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
INFORMASI SERTA MERTA
INSTANSI/SKPD: BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DIY**

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA									
NO.	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENGUASAI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	KODE KLASIFIKASI	RETENSI ARSIP	FORMAT		
							CETAK	REKAM	ONLINE
1.	Kunjungan Kerja dari RIAU	Subbag Umum	Subbag Umum	2016	Serta merta	2016	√		
2.	Kunjungan study Komparatif TP.PKK Provinsi Gorontalo	Subbag Umum				2016	√		
3.	Kunjungan Kerja BPMP Bangdes dan Tim LPPM Universitas RIAU	Subbag Umum				2016	√		
4.	Kunjungan Supervisi BNNP DIY	Subbag Umum				2016	√		
5.	Kunjungan Tim relawan pemberdayaan masyarakat dari Korea Selatan	Subbag Umum				2016	√		
6.	Permohonan koordinasi dan konsultasi mengenai upaya-upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di provinsi DIY	Subbag Umum				2016	√		
7.	Kunjungan Fatayat NU	Subbag Umum		2017		2016	√		
8.	Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten SIAK	Subbag Umum				2016	√		
9.	Kunjungan Kerja P2TP2A Kabupaten Langkat Prov. Sumatera Utara	Subbag Umum				2016	√		
10.	Kunjungan dalam rangka penyusunan perda kota layak anak	Subbag Umum				2016	√		
11.	Study banding dari pemerintah kabupaten sorong selata	Subbag Umum				2016	√		
12.	Hasil rekomendasi pembangunan bandara NYIA	Subbag Umum				2016	√		

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
INFORMASI SETIAP SAAT
INSTANSI/SKPD: BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DIY**

NO.	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENGUASAI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	KODE KLASIFIKASI	RETENSI ARSIP	Format		
							CETAK	REKAM	ONLINE
1.	Regulasi/Peraturan								
	a. PERDA DIY No. 3 Tahun 2012 tentang perempuan dan anak korban kekerasan	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan	2012	Setiap saat		√	√	√
	b. PERDA DIY No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan					√	√	√
	c. PERDA DIY No. 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan		2014	Setiap saat		√	√	√
	d. PERGUB DIY No.53 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan data gender dan anak	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan		2012	Setiap saat		√	√	√
	e. PERGUB DIY No. 66 Tahun 2012 tentang forum perlindungan korban kekerasan	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan			Setiap saat		√	√	√

	f. PERGUB DIY No. 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan			Setiap saat		√	√	√
	g. PERGUB DIY No. 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PERGUB No. 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan		2013	Setiap saat		√	√	√
	h. PERGUB No 34 Tahun 2013 tentang rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan tahun 2013-2017	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan	Bidang Perlindungan Hak Hak Perempuan		Setiap saat		√	√	√
	i. PERGUB No. 106 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pengangkatan, Struktur Keanggotaan dan Pelaksanaan Tugas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Bidang Perlindungan Hak- Hak Perempuan		2015	Setiap saat		√	√	√

j.	Surat edaran Gubernur DIY No.10/SE/2013 Tetang Asi Eklusif	Bidang Keluarga Berencana	Bidang Keluarga Berencana	2013	Setiap saat		√	√	√
k.	PERGUB No. 36 tahun 2013 tentang Pelaksanaan pengintegrasian Bina Keluarga Balita, pendidikan Anak Usia Dini dan Stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang di pos pelayanan terpadu	Bidang Keluarga Berencana	Bidang Keluarga Berencana	2013	Setiap saat		√	√	√
l.	PERGUB DIY No.109 Tahun 2015 ttg Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja	Bidang Keluarga Berencana		2015	Setiap saat		√	√	√
m.	Keputusan Gubernur DIY No. 268/KEP/2010 tentang POKJANAL Posyandu	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2010	Setiap saat		√	√	√
n.	Keputusan Gubernur No 27/TIM/2013 tentang pembentukan Tim Penggerak PKK masa bakti 2013 – 2018	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		2013	Setiap saat		√	√	√
o.	Keputusan Gubernur No 268/KEP/2010 tentang pembentukan Kelompok Kerja Operasiona; Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		2010	Setiap saat		√	√	√

	p. Peraturan Gubernur DIY No. 116 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan	Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan	2014	Setiap saat		√	√	√
2.	Permohonan informasi	Sub bagian Program, Data, dan TI	Sub bagian Program, Data, dan TI	2017	Setiap saat		√	√	√
3.	Penyebarluasan informasi BPPM DIY :								
	a. Leaflet tentang Program Keluarga Berencana	Bidang Keluarga Berencana	Bidang Keluarga Berencana	2016	Berkala	1 Tahun	√	√	
	b. Talkshow tentang Penguatan Ketahanan Keluarga di Jogja TV	Bidang Keluarga Berencana					√		
	c. Sinetron Ketahanan Keluarga serial Modiste Mbak Menik di Jogja TV	Bidang Keluarga Berencana	Bidang Keluarga Berencana	2016			√		
	d. Penayangan video clip program Kesehatan Reproduksi Remaja	Bidang Keluarga Berencana					√		
	e. Talkshow dalam rangka Peringatan Hari Ibu di TVRI Jogja	Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan	Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan	2016	Berkala	1 Tahun	√		
	f. Sosialisasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	Bidang Perlindungan Hak Hak Perempuan	Bidang Perlindungan Hak Hak Perempuan	2017			√		

	g. Talkshow tentang Peringatan Hari Anak Jogja TV						√		
4.	Layanan informasi publik : a. Web BPPM DIY www.bppm.jogjaprovo.go.id		Informasi dan Komunikasi Publik	2017	Setiap saat	1 Tahun	√		

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
INSTANSI/SKPD: BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualikan	Konsekuensi	
				Akibat Bila Informasi Dibuka	Manfaat Bila Informasi Ditutup
1.	Data pribadi pegawai	UU KIP & UU ASN	Dikecualikan untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)	Rahasia pribadi individu	Mencegah penipuan dll
2.	Data Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	UU PKDRT dan Perlindungan Anak (Perda No 3 Tahun 2012)	Dikecualikan untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)	Rahasia pribadi individu	Melindungi Korban

a.n KEPALA,
 Sekretaris BPPM DIY

Dra. Carolina Radiastuty, MM
 NIP. 19640823 199102 2 001